



DEKAT

Jurnal Dinamika Ekonomi Rakyat

Volume 2 Nomor 1, Mei 2023, Halaman 1 - 16

e - ISSN 2829-3177

Open Access at: <https://ejournal.uksw.edu/dekat>

DOI: <https://10.24246/dekat.v2i1.14287>

Penerbit: **C E M S E D** (Centre for Micro and Small Enterprise Dynamics)
Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana

ANALISIS RANTAI NILAI BERAS DI WILAYAH TERDAMPAK PERKEBUNAN KELAPA SAWIT STUDI KASUS DI KABUPATEN MEMPAWAH, KALIMANTAN BARAT

Bayu Wijayanto

Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana

bayu.wijayanto@uksw.edu

INFO ARTIKEL

Keywords: value chain survey, rice industry, palm-oil plantation, food security

ABSTRACT

This paper describes the condition of the rice industry in areas affected by oil palm plantations in Mempawah Regency, West Kalimantan. The study in this paper attempts to link the existence of oil palm plantations with food security and sustainability issues. Therefore, through a portrait of the rice industry, it is hoped that it will also be able to explain the impact of the existence of oil palm plantations on food security and sustainability issues in areas affected by oil palm plantations. In order to describe the condition of the rice industry, the study implemented the value chain survey (RN) and snowball sampling technique. The survey results showed that rice products in the affected areas have a relatively short distribution chain for consumption by people in the area. Rice productivity is low, below the average national rice productivity level. It is due to the need for more attention to the principles of good rice cultivation, such as using superior seeds, appropriate fertilizers, and good handling of pests. Existing farmer institutions, Farmer Groups, and Farmer Group Associations need to function better in supporting farmer productivity because they have limited functions in distributing subsidized fertilizers. The low productivity of rice in the area has an impact on the relatively high price of rice consumed by the community. It will make it difficult for poor communities to meet their food needs. So that the food security of the community in the affected areas of the plantation is vulnerable to disruption.

ABSTRAK

Makalah ini memotret kondisi industri beras di wilayah terdampak perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Studi dalam makalah ini mencoba mengkaitkan eksistensi perkebunan kelapa sawit dikaitkan dengan isu ketahanan dan keberlanjutan pangan. Oleh karena itu melalui gambaran potret industri beras tersebut diharapkan mampu

Kata Kunci: survey rantai nilai, industri beras, perkebunan kelapa sawit, ketahanan pangan

menjelaskan pula dampak eksistensi perkebunan kelapa sawit terhadap isu ketahanan dan keberlanjutan pangan wilayah terdampak kebun kelapa sawit. Untuk memotret kondisi industri beras dilakukan survey rantai nilai (RN) dan teknik sampling snowball. Hasil survey menunjukkan bahwa produk beras wilayah terdampak memiliki rantai distribusi relatif pendek, untuk konsumsi masyarakat di wilayah itu. Produktivitas padi rendah, dibawah rata-rata tingkat produktivitas padi nasional. Hal ini disebabkan oleh kurangnya diperhatikan prinsip-prinsip budidaya padi yang baik, seperti penggunaan bibit unggul, penggunaan pupuk yang tepat, dan penanganan hama pengganggu yang baik. Kelembagaan petani yang ada, Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani belum berfungsi secara baik dalam mendukung produktivitas petani karena memiliki fungsi terbatas penyaluran pupuk bersubsidi. Rendahnya produktivitas padi di wilayah tersebut berdampak pada relatif mahalnya harga beras yang dikonsumsi masyarakat. Hal ini akan menyulitkan kelompok masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan pangannya. Sehingga ketahanan pangan masyarakat di wilayah terdampak kebun menjadi rentan mengalami gangguan.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kelapa sawit adalah komoditas penting bagi perekonomian Indonesia karena produk minyak kelapa sawit mentah (CPO) merupakan salah satu primadona ekspor Indonesia. Produk kelapa sawit beserta turunannya pada tahun 2023 mampu berkontribusi sekitar 11,6 persen terhadap total nilai ekspor non-migas, atau senilai USD 28,45 miliar. Selain itu industri kelapa sawit pada tahun yang sama, mampu menyediakan lapangan kerja bagi 16,2 juta tenaga kerja, sehingga mampu menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat (InfoSAWIT, 2024a). Ditambahkan pula bahwa sekitar 42 persen total lahan kelapa sawit di Indonesia, pada tahun 2023, dikelola oleh petani kecil (InfoSAWIT, 2024b), sehingga diharapkan akan mampu berkontribusi dalam pengurangan angka kemiskinan. Secara ekonomi, nampak bahwa industri kelapa sawit mampu memberikan kontribusi bagi perekonomian Indonesia. Namun, diskusi mengenai eksistensi industri kelapa sawit masih menyisakan isu kontroversi jika dikaitkan dengan ketahanan pangan (food security), keberlanjutan pangan (food sustainability), dan konflik lahan. Terkait dengan isu ketahanan pangan, tak disangsikan bahwa keberadaan perkebunan kelapa sawit mampu meningkatkan penghasilan masyarakat lokal sehingga daya belinya meningkat dan meningkatkan akses mereka terhadap kebutuhan pangan.

Namun, perluasan perkebunan kelapa sawit juga berakibat berkurangnya lahan yang semula digunakan untuk memproduksi kebutuhan masyarakat lokal sehingga menimbulkan dampak negatif bagi ketahanan pangan (Hasudungan et al., 2024). Jika dikaitkan dengan isu keberlanjutan pangan, disatu sisi standar RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil)

memberikan harapan bahwa penerapan standar ini mampu menyalurkan budidaya kelapa sawit dengan keberlanjutan lingkungan (RSPO, 2020). Namun disisi yang lain, perluasan perkebunan kelapa sawit juga dapat mengakibatkan ancaman terhadap keberlanjutan pangan lokal akibat pengurangan keanekaragaman hayati dan kerusakan lingkungan (Hasudungan et al., 2024). Lebih lanjut Indriyadi (2022) memberikan argumen bahwa standar keberlanjutan seperti RSPO dan ISPO (Indonesia Sustainable Palm Oil) dipandang sebagai solusi teknosentris yang kurang efektif dan kurang memadai dalam menjelaskan kompleksitas konsep keberlanjutan ekosentris dan masih memerlukan penguatan untuk mengatasi polarisasi narasi ketidakpercayaan kepada industri sawit. Selain itu, ekspansi perkebunan kelapa sawit juga sering menimbulkan konflik lahan antara investor dengan masyarakat lokal yang berpotensi mengancam ketahanan pangan dan kesejahteraan karena akses masyarakat lokal kepada lahan pertanian pangan mereka berkurang (Nesadurai, 2013).

Paper ini bertujuan untuk memberikan potret sesaat tentang kondisi industri beras di suatu wilayah yang terdampak oleh keberadaan perkebunan kelapa sawit. Beras adalah makanan pokok bagi masyarakat Indonesia. Sehingga produk beras memiliki nilai penting dalam mengukur ketahanan pangan masyarakat di Indonesia. Sebagai satu gambaran potret sesaat maka paper ini akan fokus dalam memberikan gambaran industri beras yang terjadi dalam kurun waktu observasi penelitian. Lokasi penelitian berada di wilayah Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat. Tepatnya di beberapa desa di wilayah kecamatan Sungai Pinyuh, Sigidong dan Anjongan. Di wilayah tersebut terdapat perkebunan kelapa sawit milik perusahaan swasta nasional dengan areal lebih dari 2.000 Ha (Manurung et al., 2022). Adapun desa-desa yang wilayahnya bersinggungan langsung dengan perkebunan kelapa sawit tersebut adalah desa Kepayang, Nusapati, dan desa Sungai Purun Besar¹. Penelitian ini dilakukan pada bulan Februari – Maret tahun 2023.

Gambaran obyek penelitian

Lokasi kabupaten Mempawah terletak di bagian barat daya wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Adapun letak geografisnya kabupaten ini pada posisi 0044' Lintang Utara dan 000,4' Lintang Selatan, serta 108024' – 109021,5' Bujur Timur. Secara administratif, Kabupaten Mempawah berbatasan dengan Kabupaten Bengkayang dibagian utara, kabupaten Kubu Raya dan Kota Pontianak dibagian selatan, laut Natuna dibagian barat, dan kabupaten Landak dibagian timur. Luas kabupaten Mempawah mencapai 1.276,90 km² atau setara dengan 127.690 Ha dan secara administratif terbagi menjadi sembilan (9) kecamatan, enam puluh (60) desa, dan tujuh (7) kelurahan (BPS Mempawah, 2024).

¹ Ketiga desa tersebut merupakan desa-desa yang terdampak langsung dengan wilayah perkebunan kelapa sawit milik salah satu perusahaan swasta nasional.

Tabel 1. Gambaran Umum Wilayah Penelitian

Komponen	Desa Nusapati	Desa Sungai Purun Besar	Desa Kepayang
Luas Wilayah (Ha)	2,460	4,035	1,018
Luas Lahan Pertanian (Ha)	1,423	3,968	700
Luas Lahan Sawah (Ha)	164	600	300
% Lahan Sawah	11.52	15.12	42.86
Jumlah Petani Padi	584	NA ²	950
% Petani Padi	16.72	NA	64.89

Sumber: *Profil Desa 2023*

Wilayah observasi penelitian berada di tiga desa, yaitu pertama, desa Kepayang yang masuk dalam wilayah administratif kecamatan Anjongan; kedua, desa Nusa Pati, kecamatan Sungai Pinyuh, dan desa Sungai Purun Besar, kecamatan Sigedong. Dari data sekunder yang berhasil dikumpulkan, gambaran umum wilayah penelitian dapat dilihat pada tabel 1. Ketiga desa wilayah penelitian memiliki luasan wilayah yang berbeda. Dimana desa Sungai Purun Besar memiliki luas wilayah terbesar (4.035 ha) diikuti desa Nusapati (2.460 ha), dan terkecil desa Kepayang (1.018 ha). Namun meskipun desa Kepayang memiliki luas wilayah yang terkecil, namun peran komoditas beras memiliki peran terbesar dibandingkan dua desa lainnya. Hal ini nampak pada besaran proporsi luas lahan sawah terhadap total lahan pertanian mencapai 42,86 persen. Selain itu proporsi mata pencaharian sebagai petani padi nampak lebih menonjol mencapai lebih dari 64,89 persen dari seluruh angkatan kerja yang ada di masing-masing desa. Catatan perlu diberikan bahwa di desa Sungai Purun Besar tidak tersedia informasi banyaknya petani sawah, sebaliknya data yang ada menyebutnya bahwa mereka yang bekerja di sektor pertanian adalah pekebun, baik pemilik kebun, buruh perkebunan dan pegawai perkebunan. Selain itu tercatat sejumlah peternak dan nelayan.

Kondisi infrastruktur lahan sawah terbaik ada di desa Kepayang. Dimana di desa ini, sekitar 66,66 persen lahan sawahnya telah memiliki sarana irigasi teknis. Sebaliknya di desa Nusapati dan Sungai Purun Besar seluruh lahan sawahnya merupakan sawah tadah hujan atau sawah pasang surut. Di desa Kepayang terdapat hutan konservasi seluas 100 ha dan hutan adat seluas 61 ha. Sehingga terdapat mata air yang memiliki debit cukup besar yang mengalir ke beberapa sungai yang melewati wilayah desa ini. Hal ini menyebabkan akses air bersih di desa Kepayang

² Data jumlah petani padi tidak dapat diperoleh pada waktu masa observasi karena petani didesa tersebut identik dengan pekebun kelapa sawit yang dinilai memiliki nilai komersil lebih tinggi dibandingkan komoditas padi. Sehingga bertani padi sebagai matapencaharian sektor pertanian pelengkap yang dilakukan oleh generasi tua.

lebih baik dibandingkan dengan dua desa lainnya, dimana masih banyak warga desa yang memanfaatkan Penampungan Air Hujan (PAH) dalam memenuhi kebutuhan air bersihnya. Sehingga secara agroklimat pertanian padi di desa Kepyang relatif lebih baik dari dua desa yang lain.

Pada periode survey, BPS (Badan Pusat Statistik) menyatakan bahwa rata-rata nasional harga beras pada bulan Februari 2024 tercatat mengalami kenaikan yang signifikan di seluruh rantai distribusi beras. Pada level eceran, harga beras mencapai Rp.15.157 per Kg, mengalami peningkatan sebesar 24,65 persen (YoY), atau 6,7 persen (MoM). Pada level grosir harganya mencapai Rp.14.396 per Kg, meningkat 20,08 persen (YoY), atau 5,96 persen (MoM). Pada level penggilingan harga beras mencapai Rp.14.274, mengalami peningkatan sebesar 24,65 persen (YoY), atau 6,76 persen (MoM). Sedangkan harga gabah jenis GKP mencapai Rp.7.261 per Kg, meningkat 33,48 persen (YoY), atau 6,13 persen (MoM). Adapun harga gabah GKG mencapai Rp.8.591 per Kg, meningkat 27,14 persen (YoY), 4,86 persen (MoM). Lebih lanjut BPS menjelaskan kenaikan harga bers tersebut telah menyebabkan komoditas beras sebagai pemicu utama inflasi bulan Februari 2024. Hal tersebut terjadi karena turunnya angka produksi beras nasional sebagai dampak perubahan cuaca akibat El Nino (Kusuma, 2024).

KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Analisis Rantai Nilai

Rantai nilai didefinisikan sebagai rangkaian kegiatan dalam menghasilkan produk atau jasa yang mencakup berbagai tahap sejak dari konsepsi produk hingga konsumsi akhir dan pembuangan produk. Secara lebih spesifik rangkaian kegiatan tersebut mencakup sejak dari konsepsi produk, produksi, pemasaran, distribusi dan layanan purna jual (Kaplinsky & Morris, 2001). Dalam konteks terkait dengan komoditas pertanian Food and Agriculture Organization (FAO) mendefinisikan sebagai serangkaian kegiatan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam produksi/budidaya, agregasi, pengolahan, distribusi, konsumsi, dan pembuangan (FAO, 2024). Dengan demikian konsep rantai nilai terkait komoditas pertanian adalah seluruh rangkaian kegiatan yang diperlukan untuk membawa suatu produk pertanian dari lahan pertanian, pengolahan hasil pertanian, pengangkutan, dan pemasaran. Hal itu bisa dipahami juga sebagai rangkaian proses produksi dari hulu (up-stream), tengah (mid-stream), hilir (down-stream) suatu produk, dan konsumsi oleh konsumen hingga dibuang sebagai produk sisa konsumsi atau rangkaian siklus suatu produk (Reardon & Minten, 2021).

Dengan demikian melalui konsepsi lensa rantai nilai diatas, diperlihatkan rangkaian utuh suatu produk. Sehingga bisa digunakan untuk meneliti organisasi industri untuk suatu produk atau jasa tertentu beserta rangkaian pasarnya. Dalam satu rantai nilai produk bisa dilihat bekerjanya suatu sistem yang terdiri dari rangkaian pelaku usaha atau perusahaan yang saling bekerja sama dalam melayani satu pasar produk atau jasa tertentu. Perusahaan-perusahaan

dalam satu rantai nilai melakukan jual-beli produk dan jasa, membentuk interaksi rantai nilai, bertukar informasi, dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama membentuk jalinan hubungan vertikal rantai nilai. Selain itu perusahaan-perusahaan dalam rantai nilai yang sama juga menjadi bagian dari komunitas yang lebih besar seperti asosiasi usaha, penyedia jasa usaha, dan organisasi publik yang memberikan dukungan pengelolaan usaha. Hubungan perusahaan-perusahaan dalam rantai nilai dengan lembaga, perusahaan pendukung usaha membentuk jalinan hubungan horisontal rantai nilai (Springer-Heinze, 2018).

Pasar dan kondisi lingkungan usaha perusahaan-perusahaan dalam satu rantai nilai akan selalu berubah secara dinamis. Sehingga perusahaan-perusahaan tersebut perlu menyesuaikan kembali bisnis proses yang dimiliki, melihat kembali hubungan dengan rekan bisnisnya dan posisi perusahaan dibandingkan kompetitornya agar mampu bertahan dan sukses mengatasi masalah-masalah usaha yang dihadapinya. Oleh karena itu model pendekatan rantai nilai banyak digunakan dalam upaya intervensi program pembangunan yang berorientasi pasar (market-based development) dengan keterlibatan sektor swasta. Sejak tahun 2000an terminologi rantai nilai banyak muncul dalam kosa kata program pembangunan yang dijalankan oleh donor-donor internasional seperti organisasi-organisasi Persatuan Bangsa-Bangsa (United Nations/UN), dan lembaga-lembaga pembangunan internasional seperti Organisasi Buruh Internasional (International Labour Organization/ILO), Bank Dunia, Bantuan Pemerintah Amerika (USAID), Bantuan Pemerintah Jerman (GIZ) dan lain sebagainya (Neilson, 2014; Springer-Heinze, 2018). Analisis rantai nilai adalah suatu analisis situasi atau kondisi dari rantai nilai produk atau jasa tertentu, diwaktu yang tertentu.

METODE PENELITIAN

Dalam upaya menjelaskan profil industri beras, melalui analisis rantai nilai, di wilayah observasi penelitian digunakan metode penelitian campuran (mixed method). Creswell dan Clark (2009), menjelaskan metode penelitian campuran sebagai suatu desain penelitian atau metodologi untuk pengumpulan data, baik kuantitatif maupun kualitatif, dan analisis pada satu studi untuk menjawab persoalan-persoalan penelitian. Adapun metode-metode penelitian yang digunakan dalam studi ini yaitu menerapkan metode penelitian campuran studi kasus dan metode survey. Yin (2009), mengungkapkan bahwa studi kasus merupakan penelitian empiris untuk menganalisis suatu fenomena dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, studi kasus digunakan ketika batas-batas fenomena dengan konteks tidak nampak jelas. Fenomena yang hendak diteliti dalam studi ini adalah industri beras yang terdapat di wilayah terdampak perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Mempawah, khususnya di wilayah tiga (3) desa, yaitu Desa Kepayang, Kecamatan Anjongan, Desa Nusapati, Kecamatan Sungai Pinyuh, dan Desa Sungai Purun Besar, Kecamatan Sigidong. Penelitian ini dilakukan pada bulan Februari – Maret tahun 2024. Dalam menjelaskan fenomena industri beras tersebut, digunakan teknik analisis rantai nilai (value chain). Sedangkan metode penelitian survey menurut Singarimbun dan Effendi

(1987) didefinisikan sebagai metode penelitian untuk memperoleh data dari sejumlah responden yang menjadi bagian dari suatu populasi dengan menggunakan kuesioner dan bertujuan untuk menjelaskan suatu fenomena tertentu.

Teknik analisis rantai nilai (RN) yang diterapkan dalam studi ini mengacu pada manual pada konsepsi RN pembangunan (value chain development) yang dikembangkan oleh Springer-Heinze (2018) yang menyebutnya sebagai valuelinks, khususnya Valuelinks 2.0. Dengan mengacu pada pemahaman RN sebagaimana didefinisikan oleh Kaplinsky dan Morris (2001) maka dalam survey RN disini dimulai dari hulu menuju ke hilir industri beras di wilayah observasi dengan menerapkan teknik pemilihan responden, yaitu teknik non-random sampling, yang dikenal sebagai snowball sampling. Neuman (2002) menjelaskan bahwa snowball sampling diklasifikasikan sebagai non-probability/random sampling yang digunakan untuk meneliti jaringan aktor-aktor yang berada dalam satu jaringan. Sehingga cara menelitinya dimulai dari sejumlah responden yang memenuhi kriteria, selanjutnya diperoleh responden berikutnya atas rekomendasi responden awal. Demikian selanjutnya hingga data/informasi yang diperoleh dari para responden mampu menjelaskan gambaran mengenai jaringan tersebut. Dalam studi ini wawancara responden dimulai dari responden petani, pengusaha rice-mill, hingga pedagang beras. Teknik sampling penelitian ini dengan demikian mampu menjawab kebutuhan data/informasi dalam penerapan kerangka analisis RN untuk menggambarkan peta RN, sumbangan nilai tambah dari masing-masing aktor RN dalam industri beras di wilayah terdampak perkebunan kelapa sawit yang menjadi wilayah observasi dalam studi ini.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Hasil dan Analisis

Gambar 1 memuat peta rantai nilai (RN) usaha beras di wilayah observasi. Pada aras mikro kita bisa melihat bahwa pasar akhir (end-markets) dari produk beras yang diproduksi desa-desa wilayah terdampak masih terbatas untuk pasar lokal konsumen di wilayah tersebut³. Masyarakat lokal membeli produk beras tersebut melalui pengecer yang ada, seperti pasar tradisional, toko maupun warung Sembako (penjual bahan pokok kebutuhan masyarakat), rice mill (baik milik Gapoktan maupun milik perorangan), maupun pembelian kepada petani secara langsung. Beberapa aktor RN bisa diidentifikasi melalui gambar 1 di bawah. Dalam hal pengadaan

³ Dari hasil wawancara dengan ketua Gapoktan Jaya Bersama desa Kepayang pernah bekerja sama dengan Dinas Ketahanan pangan provinsi Kalimantan Barat untuk memasok beras bantuan pemerintah kepada masyarakat. Artinya pasar akhir produk beras wilayah observasi adalah pemerintah provinsi melalui Dinas Ketahanan pangan. Namun seiring dengan meningkatnya harga beras, khususnya gabah kering panen (GKP) yang meningkat diatas harga GKP acuan pemerintah (Rp.4.600 perKg), dimana saat dilakukan penelitian GKP dipasaran mencapai Rp. 6.000 perKg, pasokan tersebut terhenti. Selain itu Gapoktan Jaya bersama juga pernah mendapat penawaran memasok Bulog dengan pembelian harga beras kering giling (GKG) Rp.7.500 per Kg. Namun pada waktu itu harga gabah sebesar Rp.3.800 per Kg., dan setelah dihitung Gapoktan merugi Rp.375 perKg., sehingga kerja sama gagal dilakukan.

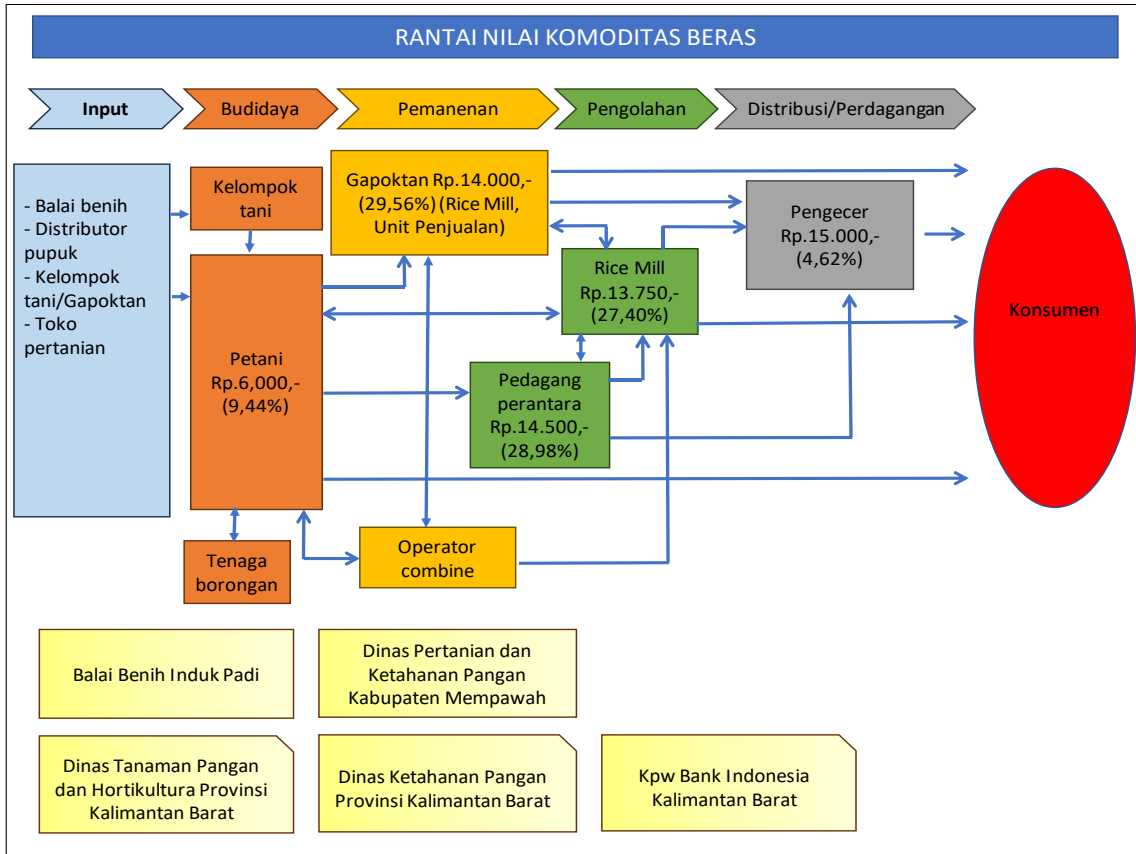
input, peran pemerintah sebagai pemasok pupuk bersubsidi memiliki peran yang sangat penting⁴. Pengadaan bibit, secara umum masih mengabaikan penggunaan bibit yang baik (bersertifikat), meskipun di wilayah terdampak berada Balai Benih Padi milik pemerintah provinsi, pemasok benih padi bersertifikat. Sehingga menjadi hal wajar jika produktivitas padi di wilayah terdampak masih relatif rendah, sekitar 3 hingga 4 ton perhektar.

Dalam hal budidaya padi, petani menjadi aktor kunci. Meskipun kelembagaan petani di wilayah terdampak telah cukup maju, dengan keberadaan kelompok tani dan gabungan kelompok tani, namun nampak peran lembaga-lembaga tersebut terhadap kesejahteraan petani masih relatif kecil. Peran kelompok tani sebatas sebagai penyalur pupuk bersubsidi pemerintah melalui mekanisme RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok). Meskipun petani menjadi aktor sentral dalam bisnis beras, namun nilai tambah yang dihasilkan relatif kecil (9,66 persen) dibandingkan aktor yang lain, hal tersebut nampak pada tabel 1. Dari tabel yang sama rata-rata biaya pembelian input relatif kecil karena masih kurangnya pemakaian bibit bersertifikat, dan minimnya penggunaan pupuk akibat kelangkaan yang terjadi pada saat observasi. Biaya operasional petani masih relatif tinggi khususnya untuk biaya tenaga kerja pengolahan tanah, biaya tanam, biaya semprot pestisida/obat, biaya panen, dan biaya angkut. Perkembangan menarik di wilayah observasi adalah hadirnya operator combine yang beroperasi menawarkan jasanya untuk melakukan kegiatan panen padi. Kehadiran operator combine telah membantu petani untuk menurunkan biaya panen. Jika secara manual petani rata-rata mengeluarkan biaya Rp.500 – Rp.600 per Kg gabah basah. Namun jika menggunakan jasa operator combine mampu menekan hingga 50 persen biaya panen, menjadi sekitar Rp. 300 per Kg gabah basah⁵.

⁴ Mekanisme pengadaan pupuk melalui kelompok tani menjadi andalan petani padi di wilayah ini. Pada saat observasi terjadi keterlambatan pasokan pupuk sehingga terjadi kelangkaan pupuk pada saat musim tanam.

⁵ Asumsi produktivitas 4 ton gabah per Ha.

Gambar 1. Peta Rantai Nilai Beras di Wilayah Terdampak Perkebunan Kelapa Sawit



Sumber: Data Primer 2024, Diolah

Aktor RN berikutnya adalah pedagang perantara. Pedagang perantara, dari hasil pengamatan, jumlahnya relatif sedikit. Mereka pada umumnya adalah petani, namun karena memiliki informasi perbedaan harga beras antar wilayah dan waktu mendorong mereka untuk mengumpulkan hasil padi sesama petani, membawanya ke penggilingan beras (*rice mills*), dan selanjutnya menjualnya ke beberapa pengecer baik di dalam maupun luar desanya. Aktor pedagang perantara dalam aktivitas usahanya menyumbang sekitar 28,91 persen. Aktor RN lain adalah Gapoktan atau Gabungan Kelompok Tani. Gapoktan ini memiliki peran dalam usaha beras di wilayah observasi karena memiliki usaha selep padi dan kios penjualan beras. Kasus ini terjadi di desa Kepayang dimana Gapoktan Jaya Bersama milik kelompok-kelompok tani disana memiliki mesin *rice mill* yang diperoleh dari bantuan Bank Indonesia kantor perwakilan wilayah (Kpw) Kalimantan Barat di tahun 2013. Selain itu Gapoktan ini juga memiliki kios penjualan beras. Gapoktan memiliki kontribusi tertinggi mencapai sekitar 29,48 persen. Sebagai catatan, Gapoktan Jaya Bersama di desa Kepayang membeli gabah kepada petani secara langsung tidak melalui kelompok. Kelompok tani berfungsi terbatas pada pendistribusian pupuk bersubsidi pemerintah, pada saat observasi tidak memiliki jadwal pertemuan rutin dan tidak terjadi regenerasi pengurusnya. Selanjutnya aktor RN lainnya adalah *Rice Mill* perorangan dalam

aktivitas usahanya mereka tidak hanya menawarkan jasa penyelepan padi, namun juga memproduksi beras untuk dijual kepada pengecer. Untuk fungsi bisnis yang dilakukannya, *rice mill* perorangan berkontribusi menciptakan nilai tambah sekitar 27,33 persen. Sebagai aktor RN di hilir, pengecer menyumbang sekitar 4,61 persen dari nilai tambah yang tercipta di wilayah ini.

Tabel 2. Distribusi Nilai Tambah

Aktor RN	Rata-rata biaya Pembelian input (Rp/Kg)	Rata-rata biaya operasional (Rp/Kg)	Rata-rata harga jual (Rp/Kg)	Nilai Tambah	
				Rp	%
Petani *	440	3,200	6,000	2,360	9.66
Pedagang Perantara **	5,940	1,500	14,500	7,060	28.91
Rice Mill Gapoktan **	5,800	1,000	14,000	7,200	29.48
Rice Mill Perorangan **	6,075	1,000	13,750	6,675	27.33
Pengecer **	13,875	-	15,000	1,125	4.61

Keterangan: * GKP; ** GKG; asumsi produktivitas 1 Ha = 4 ton

Sumber: Data Primer, 2024

Tinjauan dari aspek meso nampak bahwa industri beras di wilayah terdampak kebun PT. PSP di kabupaten Mempawah, provinsi Kalimantan Barat, memiliki dukungan kelembagaan yang cukup kuat. Mulai dari keberadaan Balai Benih Induk Padi di desa Peniraman, Sungai Pinyuh, Mempawah untuk memasok benih padi berkualitas, disamping Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan kabupaten Mempawah, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Dinas Ketahanan Pangan provinsi Kalimantan Barat. Selain itu Kpw Bank Indonesia Kalimantan Barat juga memiliki perhatian dalam pengembangan industri beras, dimana Gapoktan Jaya Bersama desa Kepayang telah mendapat bantuan mesin *rice mill*. Dari hasil wawancara dengan responden upaya-upaya pengembangan teknis budi daya padi melalui program-program pemerintah dan non-pemerintah⁶ telah banyak dilakukan. Thamrin ketua Gapoktan Jaya Bersama puluhan tahun yang lalu dengan kelompoknya telah mendapat kesempatan studi banding ke Balai Penelitian Padi Sukamandi untuk (BPS Mempawah, 2024) belajar pola tanam Jajar Legowo (Jarwo) dan sukses mengenalkan pola tanam ini kepada petani-petani di desanya, mekipun awalnya harus menerima cibiran dari petani lainnya.

⁶ Salah satu lembaga donor yang telah bekerja di wilayah terdampak kebun PT. PSP adalah World Vision Inetrnational (WVI) di desa Kepayang, dimana melalui program-programnya telah mendatangkan ahli-ahli pertanian, diantaranya dosen-dosen dari Fakultas Pertanian UKSW Salatiga.

Demikian pula upaya melatih petani sebagai penangkar benih telah menghasilkan penangkar-penangkar lokal terlatih di desa-desa wilayah observasi dan telah memiliki hubungan dengan PT. Sang Hyang Sri selaku distributor benih bersertifikat. Namun saat observasi aktor-aktor petani di desa-desa tersebut tidak melanjutkan kegiatan penangkaran yang telah dirintisnya. Dalam tabel 1 nampak bahwa rata-rata biaya pembelian input relatif kecil, sekitar 24,36 persen (Rp. 500 per Kg. GKP) dari total biaya produksinya. Kuat diduga petani-petani tersebut banyak yang tidak menggunakan benih bersertifikat dan pola pemupukan yang tepat. Sehingga jika produktivitas masih relatif rendah (3,5-4,5 ton per Ha) dibandingkan tingkat produktivitas padi secara nasional menjadi masuk akal. Program mekanisasi juga telah berulang kali dilakukan namun karena program tersebut tidak dibarengi dengan pelatihan ketrampilan operasional maupun pemeliharaan peralatan mekanisasi tersebut maka banyak peralatan yang mangkrak dan tidak bisa dioperasikan lagi.

Pada tahun 2013 gapoktan Jaya Bersama di desa Kepayang mendapatkan bantuan fasilitas penggilingan (*rice mill*) dan pengeringan. Berdasarkan informasi ada 80an unit bantuan sejenis di Kalimantan Barat, namun hanya sebagian kecil yang masih bertahan beroperasi, diantaranya adalah gapoktan Jaya Bersama. Gapoktan ini pada tahun 2022 juga telah mendapatkan bantuan hibah dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat berupa uang senilai Rp 150 juta untuk program yang dinamakan kemandirian kelompok tani. Skema yang dilakukan adalah melakukan pembelian GKP, mengolah dikeringkan, digiling kemudian dikemas dan selanjutnya dijual ke pasar/konsumen untuk mendukung ketahanan pangan masyarakat. Namun program pembelian GKP ini saat observasi terkendala karena harga pasaran GKP mencapai Rp. 6.000 per Kg., sedangkan dalam ketentuan skema program ditetapkan pada harga Rp.4.600 per Kg.

Beberapa catatan penting diperoleh dari profil responden pelaku usaha beras yang telah terkonfirmasi dalam diskusi kelompok terarah (FGD). Dari sisi usaha, sebanyak 62 persen responden menyatakan bahwa rata-rata luas lahan garapannya antara 1 – 2 Ha., lebih luas dibandingkan rata-rata luas garapan petani padi Indonesia yaitu sekitar 0,25 Ha. Hal ini tentu merupakan potensi keunggulan skala ekonomi usaha pertanian padi di wilayah observasi. Terkait dengan biaya langsung usaha tani, mereka menyatakan bahwa biaya terbesar adalah biaya langsung tenaga kerja yang mencapai sekitar 60 persen dari total biaya langsung. Dengan kondisi ini maka kebutuhan untuk menerapkan mekanisasi usaha tani di wilayah observasi menjadi kebutuhan nyata. Memang pemerintah telah memberikan bantuan alsintan, namun tanpa dibarengi dengan penyiapan SDM yang mendukung sehingga bantuan tersebut tidak efektif.

Dari sisi pribadi responden, latar belakang pendidikan responden sebagian besar (54 persen) mengenyam pendidikan setingkat SD. Dari latar belakang usia, 46 persen berusia lebih dari 60 tahun dan 31 persen berusia antara 50 hingga 59 tahun. Sehingga mayoritas responden petani di desa-desa wilayah terdampak tidak dalam usia yang ideal sebagai petani. Dalam FGD kondisi ini tidak dibantah oleh para peserta dan pada umumnya mengeluhkan generasi petani

muda tidak tertarik berusaha tani padi karena secara komersil kalah dibandingkan usaha tani lainnya, khususnya kelapa sawit bagi yang masih bertahan di desa kelahirannya. Begitu menariknya secara ekonomi usaha tani kelapa sawit hingga timbul kejahatan pencurian di lahan-lahan PT. PSP.

Dari hasil wawancara dengan responden terpilih ditemukan masalah-masalah terkait usaha tani padi atau beras. Pada urutan pertama, sekitar 32 persen responden mengeluhkan kondisi infrastruktur pengairan lahan sawah, dimana dikeluhkan saluran tidak lancar dan air selalu menggenang. Urutan keluhan kedua (20 persen) terkait hama tanaman padi seperti keong, tikus dan burung yang mengurangi hasil produksi padinya. Ketiga, mengeluhkan mengenai kelangkaan pupuk (12 persen) terutama pupuk bersubsidi dari pemerintah. Sebagai contoh salah satu kelompok tani di desa Kepayang menyatakan bahwa sebelum terjadi pandemi Covid 19, proses pengadaan pupuk melalui skema pengajuan RDKK sangat mendukung produktivitas hasil panen padi mereka. Namun semenjak terjadi kelambatan stok pupuk, apalagi menjelang musim tanam, mengakibatkan hasil panen yang semula bisa mencapai 3 ton per hektar, dengan kondisi stok pupuk yang tidak jelas hasil panen hanya bisa mencapai 1,9 ton/ha. Keempat, masing-masing dikeluhkan oleh sekitar 8 persen responden, yaitu sulitnya mencari tenaga kerja untuk dipekerjakan di lahan sawah dan masalah kelembagaan gapoktan khususnya dalam pengelolaan tidak terbuka dan tidak terjadi regenerasi pengurus.

Diskusi

Dalam bagian pendahuluan paper ini menjelaskan bahwa studi mengenai kondisi industri beras ini dilakukan di wilayah terdampak perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Pengembangan budidaya monokultur bukan hal baru di wilayah Kalimantan Barat. Sejak abad ke-19 budidaya monokultur telah mulai dikembangkan, seperti tebu, kopra, dan karet (Krisdiana et al., 2019). Namun ditemukannya bahan substitusi komoditas-komoditas tersebut dan terjadinya inefisiensi produksi mengakibatkan permintaan akan komoditas-komoditas tersebut menurun. Saat ini, komoditas kelapa sawit (pengganti kopra), muncul sebagai primadona komoditas primer di Kalimantan Barat, maupun Indonesia secara umum. Hasudungan et al. (2024) berpendapat bahwa perluasan perkebunan kelapa sawit akan mengakibatkan berkurangnya lahan yang semula digunakan untuk memproduksi kebutuhan masyarakat lokal sehingga menimbulkan dampak negatif bagi ketahanan pangan. Pendapat ini tidak berlaku bagi industri beras di wilayah observasi ini, karena tersedia lahan pertanian sawah yang masih relatif luas kurang lebih 1.000 Ha di wilayah administrasi tiga desa terdampak kebun kelapa sawit. Dalam kasus industri beras di wilayah terdampak ini masalah yang terjadi adalah rendahnya produktivitas padi, dimana hasil panen GKG per ha sebesar 3-4 ton. Angka produktivitas ini dibawah angka produktivitas padi nasional sebesar 5,17 ton per Ha (BPS, 2023). Hal ini mengakibatkan harga beras di wilayah terdampak menjadi relatif mahal. Informasi pada saat observasi sekitar bulan Februari – Maret 2024, harga jual beras lokal di tingkat eceran mencapai Rp.15.000,- per Kg., terpaut sedikit dengan harga eceran nasional yang mencapai

mencapai Rp.15.157 per Kg. (Kusuma, 2024). Akibatnya beras produk lokal menjadi sulit bersaing untuk dipasarkan di luar wilayah. Hal ini terlihat dengan relatif pendeknya jalur RN komoditas beras di wilayah terdampak perkebunan kelapa sawit ini.

Gambaran industri beras di wilayah terdampak perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Mempawah ini, nampaknya juga mewakili gambaran secara umum untuk wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Pada saat observasi berlangsung laporan Bank Indonesia perwakilan Kalimantan Barat melaporkan bahwa pada bulan Februari 2024 komoditas muncul sebagai komoditas penyumbang inflasi daerah kedua terbesar, setelah cabai rawit, dengan menyumbang sebesar 0,08 persen terhadap laju inflasi Provinsi Kalimantan Barat pada bulan Februari 2024. Pada bulan Maret 2024, komoditas beras menjadi komoditas penyumbang inflasi terbesar, dengan memberikan andil sebesar 0,12 persen terhadap laju inflasi Kalimantan Barat pada bulan ini (Bank Indonesia, 2024). Kondisi ini tentunya tidak menguntungkan bagi penduduk miskin dalam memenuhi kebutuhan pangan mereka, dan selain itu juga berdampak buruk bagi kinerja perekonomian wilayah Kalimantan Barat karena komoditas beras turut menyumbang pada terjadinya ketidakstabilan ekonomi lokal. Temuan ini dikuatkan pula oleh laporan yang dibuat oleh Krisdiana et al. (2019) bahwa Kalimantan Barat merupakan salah satu wilayah dengan produktivitas padi terendah secara nasional sehingga Bank Indonesia kantor perwakilan Kalimantan Barat melalui wadah TPID (Tim Pengendalian Inflasi Daerah) bersinergi mewujudkan Kalimantan Barat Mandiri Pangan. Dalam buku yang sama juga dilaporkan bahwa defisit bahan pangan, terutama beras telah terjadi sejak abad-19, bersamaan dengan dikenalkannya budidaya monokultur. Pandangan masyarakat secara umum di Kalimantan Barat, nampaknya terefleksi di Desa Sungai Purun Besar, dimana dalam Profil Desanya tidak ada data petani, yang ada adalah data pekebun. Menurut masyarakat disana matapencaharian utama dari sektor pertanian adalah sektor perkebunan, maka tidak ada profesi petani karena profesi tersebut bukan mata pencaharian utama. Hal ini tentu sejalan dengan pandangan bahwa menanam komoditas dengan nilai komersil yang tinggi akan meningkatkan pendapatannya dan mampu meningkatkan akses terhadap kebutuhan pangan mereka. Namun rendahnya produktivitas padi yang berimbas pada mahalnya harga beras sehingga mendorong laju inflasi daerah akan merugikan perekonomian Kalimantan Barat secara keseluruhan, terutama akan menyulitkan masyarakat miskin dalam pemenuhan kebutuhan pangan mereka, artinya hal itu berpotensi mengakibatkan turunnya ketahanan pangan di wilayah observasi dalam jangka panjang.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Kesimpulan dan Rekomendasi

Hasil survey terhadap pelaku-pelaku usaha industri beras di wilayah terdampak perkebunan kelapa sawit menghasilkan temuan sebagai berikut. Dari peta RN yang berhasil digambarkan menunjukkan bahwa pelaku-pelaku RN usaha produksi beras hasil produksi pelaku diwilayah observasi pemasok input produksi (toko pertanian, kelompok tani, distributor pupuk,

dan Balai Benih Induk Padi), petani padi, kelompok tani, Gapoktan, pedagang perantara, pengusaha selep (rice mills), dan pengecer. RN yang terjadi relatif pendek, dimana konsumen beras terbatas pada konsumen lokal. Tingkat produktivitas usaha budidaya padi di wilayah terdampak lebih rendah (3-4 ton per Ha) dari rata-rata nasional. Diduga kuat hal ini disebabkan oleh belum dipraktikkannya cara budidaya padi yang baik seperti diabaikannya penggunaan bibit yang baik (bersertifikat), kekurangan pupuk dan kurangnya dilakukan pengendalian hama pengganggu, hal ini tercermin pada relatif rendahnya rata-rata biaya input per kg beras, hanya sebesar Rp. 440,-. Komponen pengeluaran usaha terbesar budidaya padi untuk biaya tenaga kerja, yang mencapai 72,54 persen dari total biaya usaha tani. Petani menjadi pelaku RN yang menciptakan nilai tambah terkecil, yaitu sebesar 9,66 persen tidak sebanding dengan resiko yang dihadapinya dalam usaha di industri ini. Kelembagaan petani nampak belum berjalan sebagaimana mestinya karena fungsinya masih sebatas penyalur pupuk bersubsidi⁷. Rendahnya produktivitas usaha tani tersebut menyebabkan relatif tingginya harga beras produksi wilayah observasi, hampir menyamai harga beras eceran rata-rata nasional.

Gambaran industri beras di wilayah terdampak perkebunan sawit ini ternyata merupakan fenomena umum yang terjadi di Kalimantan Barat sejak lama. Wilayah Kalimantan Barat defisit produksi beras, ditengah-tengah keberhasilannya dalam memproduksi komoditas-komoditas primer dengan nilai komersial yang tinggi. Saat ini Provinsi Kalimantan Barat menjadi produsen kelapa sawit ketiga terbesar secara nasional, pada tahun 2022 menyumbang 10,97 persen produksi nasional (BPS, 2024). Hal ini mengakibatkan ketergantungan pasokan beras dari wilayah lain, terutama dari P. Jawa dan memberi sumbangan pada tingginya laju inflasi daerah. Dengan kata lain, kondisi ini menciptakan instabilitas perkonomian daerah Kalimantan Barat dan berdampak buruk pada penduduk miskin untuk memenuhi kebutuhan pangannya atau ketahanan pangannya rentan terganggu oleh adanya fluktuasi harga beras. Dalam perspektif ini terlihat bahwa superioritas komoditas kelapa sawit telah menyebabkan inferioritas komoditas pangan, khususnya beras sehingga memiliki dampak instabilitas pada pekonomian makro regional.

Oleh karena itu, penguatan RN usaha beras di wilayah terdampak kebun kelapa sawit di Kabupaten Mempawah memiliki urgensi yang sama dengan masalah yang dihadapi masyarakat di aras Provinsi Kalimantan Barat. Mengingat fenomena masalah ini telah terjadi sejak lama. Upaya-upaya dalam mengatasi masalah tersebut juga sudah dilakukan baik oleh pemerintah daeran maupun pemerintah pusat. Namun, masalah tersebut masih belum bisa teratasi hingga saat ini. Hal ini memberikan indikasi perlunya pendekatan berbeda dari yang sebelumnya pernah dipraktikkan. Salah satu upaya yang perlu diusulkan adalah keterlibatan sektor swasta dalam penanganan masalah tersebut. Hadirnya perusahaan-perusahaan milik swasta nasional maupun asing memberikan peluang untuk terlibat dalam melakukan penguatan RN usaha beras di

⁷ Mungkin kelembagaan petani pada awal pembentukannya memiliki kegiatan program yang jelas. Namun, pada saat observasi aktivitas tersebut tidak berjalan.

wilayah beroperasinya perusahaan-perusahaan itu. Instrumen bagi kebijakan itu telah ada yaitu Peraturan Daerah (PERDA) nomor 4 tahun 2015 tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Melalui instrumen ini kolaborasi multistakeholder industri beras bisa dilakukan. Diharapkan dengan adanya kolaborasi pemerintah daerah dan sektor swasta yang ada mampu memperkuat RN industri beras di wilayah terdampak kebun kelapa sawit sehingga mampu memperkuat ketahanan dan keberlanjutan pangan bagi masyarakat di wilayah terdampak kebun kelapa sawit.

DAFTAR PUSTAKA

- Bank Indonesia. (2024). *Laporan Perekonomian Provinsi Kalimantan Barat Mei 2024*. <https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/lpp/Pages/Laporan-Perekonomian-Provinsi-Kalimantan-Barat-Mei-2024.aspx>
- BPS. (2023). *Analisis Produktivitas Padi di Indonesia 2022 (Hasil Survei Ubinan)*. <https://www.bps.go.id/id/publication/2023/12/14/19b1aacc533260313b1edece/analisis-produktivitas-padi-di-indonesia-2022--hasil-survei-ubinan-.html>
- BPS. (2024). *Statistik Kelapa Sawit Indonesia 2023*. <https://www.bps.go.id/id/publication/2024/11/29/d5dcb42ab730df1be4339c34/statistik-kelapa-sawit-indonesia-2023.html>
- BPS Mempawah. (2024). *Kabupaten Mempawah Dalam Angka 2024*. Bps.Go.Id. <https://mempawahkab.bps.go.id/id/publication/2024/02/28/ccb1701fb88370ad6200ee7f/kabupaten-mempawah-dalam-angka-2024.html>
- Creswell, J. W., & Clark, J. D. (2009). *Mixed Methods Research: Development, Debates, and Dilemmas* (E. F. H. I. Richard A. Swanson (ed.); Vol. 36, Issue 3). Berrett-Koehler Publishers, Inc. <https://doi.org/10.2190/4U0V-9R10-4TXM-D0JN>
- FAO. (2024). *Developing Sustainable Food Systems and Value Chains for Climate-Smart Agriculture*. <https://www.fao.org/climate-smart-agriculture-sourcebook/production-resources/module-b10-value-chains/b10-overview/en/>
- Hasudungan, A., Raeskyesa, D. G. S., & Fromm, I. (2024). Analysis of the foreign direct investment, oil palm expansion, and food security in Indonesia: Sumatra and Kalimantan case studies. *Discover Sustainability*, 5(1), 287. <https://doi.org/10.1007/s43621-024-00452-7>
- Indriyadi, W. (2022). Palm Oil Plantation in Indonesia: A Question of Sustainability. *Salus Cultura: Jurnal Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan*, 2(1), 1–10. <https://doi.org/10.55480/saluscultura.v2i1.40>
- InfoSAWIT. (2024a). *Peran dan Kontribusi Strategis Kelapa Sawit dalam Ekonomi Indonesia*. InfoSAWIT. <https://www.infosawit.com/2024/05/18/peran-dan-kontribusi-strategis-kelapa-sawit-dalam-ekonomi-indonesia/>
- InfoSAWIT. (2024b). *SNPI: Pentingnya Industri Kelapa Sawit dalam Perekonomian Indonesia*. InfoSAWIT. <https://www.infosawit.com/2024/05/15/snpi-2024-pentingnya-industri-kelapa-sawit-dalam-perekonomian-indonesia/>
- Kaplinsky, R., & Morris, M. (2001). A Handbook for Value Chain Research. In *Idrc* (Vol. 113, Issue January 2001).
- Krisdiana, R., Usman, S., Andi, U. F., Akbar, A., & Wibawa, M. A. (2019). *Menegakkan kedaulatan*

- dan ketahanan Ekonomi: Bank Indonesia Dalam Pusaran Sejarah Kalimantan Barat. BI Institute. https://www.researchgate.net/profile/Nawiyanto-Nawiyanto-2/publication/342123243_MENEGAKKAN_KEDAULATAN_DAN_KETAHANAN_EKONOMI_BANK_INDONESIA_DALAM_PUSARAN_SEJARAH_KALIMANTAN_BARAT_Upholding_sovereignty_and_economic_resilience_Bank_Indonesia_in_the_historical_vortex_in_West_Kalimant/links/5ee35214458515814a5838c9/MENEGAKKAN-KEDAULATAN-DAN-KETAHANAN-EKONOMI-BANK-INDONESIA-DALAM-PUSARAN-SEJARAH-KALIMANTAN-BARAT-Upholding-sovereignty-and-economic-resilience-Bank-Indonesia-in-the-historical-vortex-in-West-Kalimant.pdf
- Kusuma, A. I. (2024). *Harga Beras 1 Maret 2024, Sentuh Angka Tertinggi Sepanjang Sejarah Perberasan di Tanah Air*. Kompas.Go.Id. <https://www.kompas.tv/nasional/489336/harga-beras-1-maret-2024-sentuh-angka-tertinggi-sepanjang-sejarah-perberasan-di-tanah-air>
- Manurung, R., Gunawan, J., Hazriani, R., & Suharmoko, J. (2022). Pemetaan Status Unsur Hara N, P Dan K Tanah Pada Perkebunan Kelapa Sawit Di Lahan Gambut. *Pedontropika : Jurnal Ilmu Tanah Dan Sumber Daya Lahan*, 3(1), 89. <https://doi.org/10.26418/pedontropika.v3i1.23438>
- Neilson, J. (2014). Value chains, neoliberalism and development practice: The Indonesian experience. *Review of International Political Economy*, 21(1), 38–69. <https://doi.org/10.1080/09692290.2013.809782>
- Nesadurai, H. E. S. (2013). Food security, the palm oil–land conflict nexus, and sustainability: a governance role for a private multi-stakeholder regime like the RSPO? *The Pacific Review*, 26(5), 505–529. <https://doi.org/10.1080/09512748.2013.842311>
- Neuman, W. L. (2002). Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches. In *Teaching Sociology* (Vol. 30, Issue 3). <https://doi.org/10.2307/3211488>
- Reardon, T., & Minten, B. (2021). Food value chain transformation in developing regions. *IFPRI Book Chapters*, 397–438. https://ideas.repec.org/h/fpr/ifpric/9780896293830_12.html%0Ahttps://ideas.repec.org/h/fpr/ifpric/9780896293830_12.html
- RSPO. (2020). *From farm to plate: how sustainable is the palm oil in your food?* RSPO.
- Singarimbun, M., & Effendi, S. (1987). *Metode Penelitian Survei* (7th ed.). LP3ES.
- Springer-Heinze, A. (2018). Manual on Sustainable Value Chain Development Volume. *GIZ Eschborn*, 1(January). <http://valuelinks.org/wp-content/uploads/2015/09/ValueLinks-Manual-2.0-Vol-1-January-2018.pdf>
- Yin, R. . (2009). *Case study research: Design and methods* (4th ed.). Thousand Oaks.